



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

RENSTRA



2021 - 2026

RENCANA STRATEGIS

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Sukabumi



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi 2021-2026 ini dengan baik dan lancar.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian ini disusun sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengharuskan setiap SKPD memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang koordinatif, integratif, sinkron dan sinergis. Dalam penyusunannya mengacu atau berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian ini tentu masih banyak kekurangan, oleh karena itu sumbang saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Renstra yang akan datang.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, keberadaan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian ini mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala daya dan upaya kita. Amin.

Cikembang, 29 Oktober 2021
Kepala Dinas Komunikasi Informatika
dan Persandian

EKA NANDANG NUGRAHA, S.IP., MM
Pembina Tk.1 IV/b
NIP.19670903 199601 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KAB SUKABUMI	12
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi	12
2.2. Sumberdaya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	14
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	15
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	19
BAB III ISU-ISU STRATEGIS	21
3.1. Identifikasi permasalahan	21
3.2. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	22
3.3. Telaahan Renstra K/L	26
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS	29
3.5. Penentuan Isu isu Strategis	30
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	32
4.1. Tujuan	33
4.2. Sasaran	33
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	35
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	35
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	39
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	79
BAB VIII PENUTUP	90



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada era digitalisasi industry 4.0 ini keberadaan peran bidang Komunikasi Informatika dan Persandian sangat diperlukan, terutama dalam upaya kontribusi kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi yang setiap tahunnya mengalami perkembangan yang signifikan menuntut pemerintah daerah, swasta dan masyarakat Indonesia harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kompetensi khususnya yang berbasis platform digital.

Saat ini perkembangan digitalisasi khususnya pada pemerintahan masih dalam tahap awal pelaksanaan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang tercantum pada peraturan presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), digitalisasi di pemerintahan menjadi lebih terarah dan terencana. Salah satu permasalahan pada digitalisasi pemerintahan adalah sistem dan data pemerintahan pusat dan daerah yang sebagian masih analog, dan sebagian lainnya terdigitalisasi tetapi belum terintegrasi satu sama lain. Hasil yang dilakukan tahun 2018 menyebutkan terdapat 2.700 pusat data dan ruang server milik pemerintah daerah dengan perkiraan 95% diantaranya tidak memenuhi standar. Dari sisi keamanan, terdapat potensi 65% kebocoran data karena lemahnya *system security* pusat data/ruang server dan transmisi data pada jaringan internet yang tidak diamankan.

Terbitnya Praturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia juga merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat integrasi data seluruh instansi pemerintahan. Hasil yang sama menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 27.400 aplikasi dan 27.400 *database multi-platformm* dan *multi-standard* yang tidak terintegrasi satu sama lain, serta memiliki data tersebar. Duplikasi sistem dan aplikasi serta pembangunan pusat data dan ruang server yang *redundant* menimbulkan biaya belanja TIK pemerintahan menjadi tidak efisien.

Dari segi ekonomi, digitalisasi menjadi faktor pengungkit sektor untuk tumbuh lebih produktif. Saat ini sektor-sektor strategis dalam negeri juga dalam proses awal transformasi, seiring dengan bertumbuhnya *Star Up* digital nasional yang menjadi katalis di sektor-sektor strategis nasional seperti pertanian, perikanan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, logistic dan perdagangan (UMKM). Dalam mengembangkan ekonomi digital nasional, sektor-sektor tersebut memegang peran



penting dan perlu segera di digitalisasi.

Pada RPJMN 2020-2024 pun telah melihat bahwa transformasi digital pada sektor-sektor strategis nasional perlu segera dilaksanakan, karena dengan meningkatkan pemanfaatan TIK pada sektor-sektor strategis, akan mendorong pertumbuhan dalam rangka peningkatan efisiensi, produktifitas, nilai tambah, dan penciptaan permintaan, melalui peningkatan produktifitas sektor ekonomi.

Salah satu faktor utama dalam keberhasilan proses digitalisasi digital adalah kompetensi SDM nasional di bidang digital. Dengan kemajuan perkembangan era digital, berbagai riset menunjukkan akan terjadi *job displacement* atas dampak dari pergeseran kompetensi SDM yang dibutuhkan industri. Hasil studi Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menguatkan hal tersebut, bahwa terjadi *gap (mismatch)* antara *skill* yang menjadi kebutuhan industry dengan *skill* sumber daya manusia yang dihasilkan dari Lembaga Pendidikan.

Selain dari pada kondisi di atas, terdapat pula arahan dari presiden Joko Widodo untuk dapat membajak atau memanfaatkan momentum pandemi COVID-19 dan melakukan lompatan besar sebagai upaya nyata untuk membangkitkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Arahan tersebut direalisasikan dengan mempercepat agenda transformasi digital nasional melalui 5 (lima) langkah yaitu mempercepat pembangunan insfrastruktur digital dan penyediaan layanan internet, mempersiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, mempercepat integrasi pusat data nasional, mengembangkan sumber daya manusia dan talenta digital, serta menyiapkan berbagai regulasi dan skema pembiayaan untuk mendukung ekosistem digital. Lima langkah percepatan transformasi digital yang dicanangkan oleh presiden Joko Widodo menjadi fondasi bagi pengembangan *roadmap* Indonesia Digital.

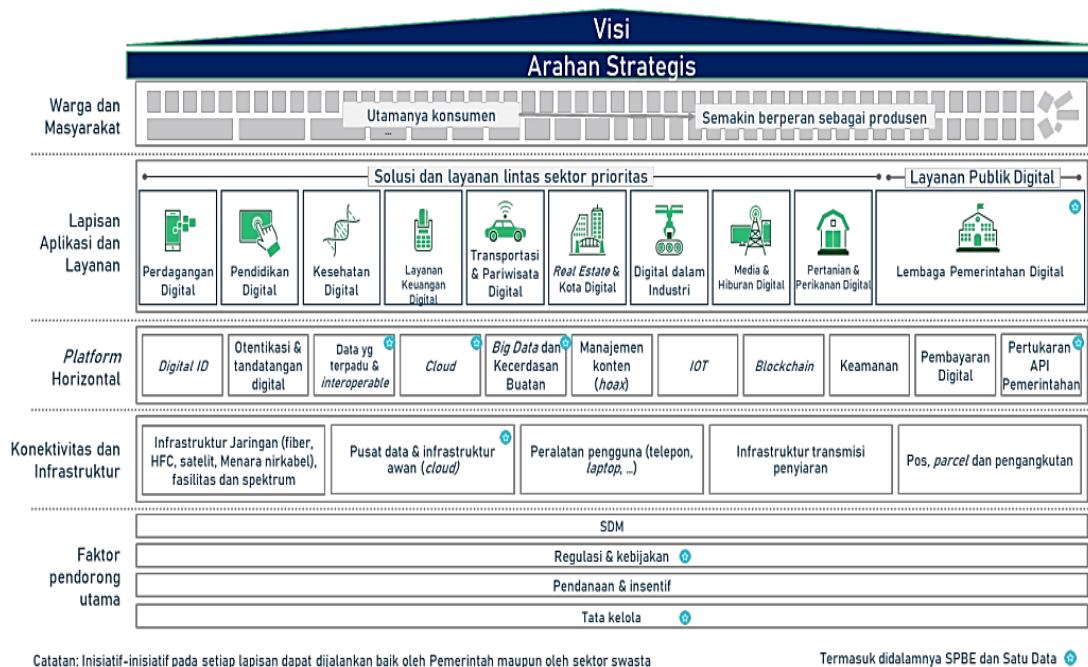
Indonesia Digital menetapkan 6 (enam) arahan strategis untuk mewujudkan visinya. Enam arahan tersebut bertujuan untuk mengarahkan Indonesia menuju ekonomi berbasis inovasi dengan kapabilitas teknologi berkelas dunia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, dan masyarakat yang berbudaya digital serta siap menghadapi masa depan. Enam arahan strategis yang dimaksud adalah :

1. Membangun insfrastruktur dan konektivitas yang aman dan andal dengan layanan berkualitas tinggi;
2. Mengubah Indonesia dari konsumen menjadi produsen teknologi melalui investasi pada berbagai *platform* yang memiliki nilai kepentingan strategis nasional, diantaranya pusat data, insfrastruktur *cloud*, dan identitas digital



- nasional;
3. Meningkatkan daya saing geostrategis dan mendorong pertumbuhan yang inklusif;
 4. Membangun Lembaga pemerintahan digital yang terbuka dan terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan publik;
 5. Membangun budaya digital dan memanfaatkan bonus demografi serta memberdayakan rakyat Indonesia dalam mengembangkan dunia digital; dan
 6. Harmonisasi regulasi dan meningkatkan pendanaan untuk memajukan inovasi.

Gambar 1.1
Arah Kebijakan Transformasi Digital Nasional



Untuk mewujudkan transformasi digital nasional ini khususnya di Kabupaten Sukabumi, dibutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat, perangkat daerah terkait dan unsur swasta secara keseluruhan untuk mendukung mewujudkan program-program digitalisasi. Selain itu, dengan dinamika yang tinggi, maka pemutakhiran dan perubahan dalam arah kebijakan strategis menjadi hal yang perlu disesuaikan pada perkembangan di setiap tahun anggaran.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Sukabumi dalam 5 (tahun) kebelakang terus mengembangkan dan mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengamanan informasi serta pengelolaan data statistik sektoral. Melalui rencana strategis 5 (lima) tahunan yang disusun, Diskominfo Kabupaten Sukabumi berupaya merancang program dan kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi



secara nasional khususnya di Kabupaten Sukabumi, melalui penyediaan layanan internet, penyebarluasan informasi publik untuk masyarakat, melakukan pengamanan informasi daerah dan mengelola data statistik sektoral untuk data pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran.

Rencana strategis Diskominfo Kabupaten Sukabumi dirancang dengan merujuk pada Perpres No. 18 Tahun 2020, dan dengan meninjau hasil evaluasi capaian kinerja pada Renstra Diskominfo Sebelumnya. Pada Renstra Diskominfo Tahun 2016-2021, Diskominfo berupaya mendukung pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung implementasi e-government, antara lain dengan meningkatkan ketersediaan akses internet dan menyiapkan infrastruktur TIK. Selain itu, dengan fungsi Diskominfo sebagai pengelola komunikasi publik, pengamanan informasi daerah dan pengelolaan pusat data statistik sektoral.

Selanjutnya, dalam rangka penjabaran RPJMD tahun 2021-2026 serta dalam rangka pelaksanaan tugas Diskominfo yang menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah. Diskominfo juga memiliki program-program yang di tujukan untuk mendukung pencapaian visi misi dari kepala daerah terpilih diantaranya :

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Secara nasional, lanskap digital terus berevolusi dan berbagai upaya besar serta terarah dibutuhkan untuk mendorong perkembangan digital khususnya pada sektor publik dan swasta di Kabupaten Sukabumi. Transformasi digital menjadi salah satu prasyarat utama menuju 5 (lima) besar ekonomi, dan semakin penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat dampak dari COVID-19, namun, proses ini tidak dapat dilaksanakan oleh Diskominfo saja, melainkan memerlukan sinergi dengan perangkat daerah terkait lainnya juga yang berjalan pada lanskap digital yang sama.

Untuk dapat memadukan transformasi digital di Indonesia khususnya Kabupaten Sukabumi secara menyeluruh sekaligus untuk menunjang visi dan misi kepala daerah terpilih Diskominfo pada periode Renstra 2021-2026 akan berfokus pada misi ke 3 (tiga) yaitu **meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah** sebagai salah satu penunjang dalam mencapai tujuan meningkatkan pertumbuhan infrastruktur daerah yang berkualitas.



1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Undang – undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers;
4. Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penata kelolaan e-Government;
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
19. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);



24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
31. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
32. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
33. Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan System Dan Transaksi Elektronik;
34. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Persandian;



35. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
36. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
37. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
38. Intruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
39. Intruksi Presiden nomor 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
42. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 21 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 22 tahun 2015 tentang rencana strategis kemenkominfo tahun 2015 – 2019;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032;
49. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 89);



50. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomer 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
51. Peraturan Bupati Sukabumi nomor 110 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2021 – 2026;
52. Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor 78 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah :

1. Maksud :
 - a. Sebagai pedoman dalam mengarahkan kebijakan-kebijakan pembangunan di bidang urusan komunikasi informatika, persandian dan statistik dalam kurun waktu 5 tahun;
 - b. Menyediakan dokumen rencana teknis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam menyusun Rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagai bahan masukan penyusunan RKPD/SIPD, KUA dan PPAS dengan menggunakan pendekatan kinerja yang diawali dengan pernyataan masalah dan target kinerja yang terukur, penetapan arah kebijakan teknis yang terfokus lengkap dengan informasi mengenai lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
 - c. Menyediakan alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian atas pelaksanaan program secara terukur.
2. Tujuan :
 - a. Mendukung arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sukabumi agar tujuan, sasaran, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat tercapai;
 - b. Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur selama 5 tahun;
 - c. Memudahkan penyusunan laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan LKPJ, LPPD kepala daerah.

1.4 SISTEMATIKA

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026, terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud & Tujuan dan Sistematika.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Mengambarkan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Menjelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan Pendanaan indikatif.



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS

2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1. Tugas Pokok dan Kedudukan Dinas

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi, maka Diskominfosan menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi informatika, bidang persandian dan bidang statistik.

2.1.2. Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya yaitu membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan dalam urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian serta Statistik;
- c. Pemantauan pelaksanaan tugas di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; Bidang Aplikasi Informatika; Bidang Persandian dan Keamanan Informasi; Bidang Statistik; kelompok jabatan fungsional; dan unit kerja lainnya di lingkungan dinas;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan dinas;
- e. Penyelenggaraan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;
- f. Penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan nama domain dan subdomain daerah kabupaten sukabumi;
- h. Penyelenggaraan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik) daerah kabupaten;
- i. Penyelenggaraan layanan pengaduan masyarakat;
- j. Penyelenggaraan sistem informasi pelayanan publik daerah kabupaten;



- k. Penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi daerah kabupaten;
- l. Penyelenggaraan statistik sektoral daerah kabupaten;
- m. Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas;
- n. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas;
- o. Penyelenggaraan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugas;
- q. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- r. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

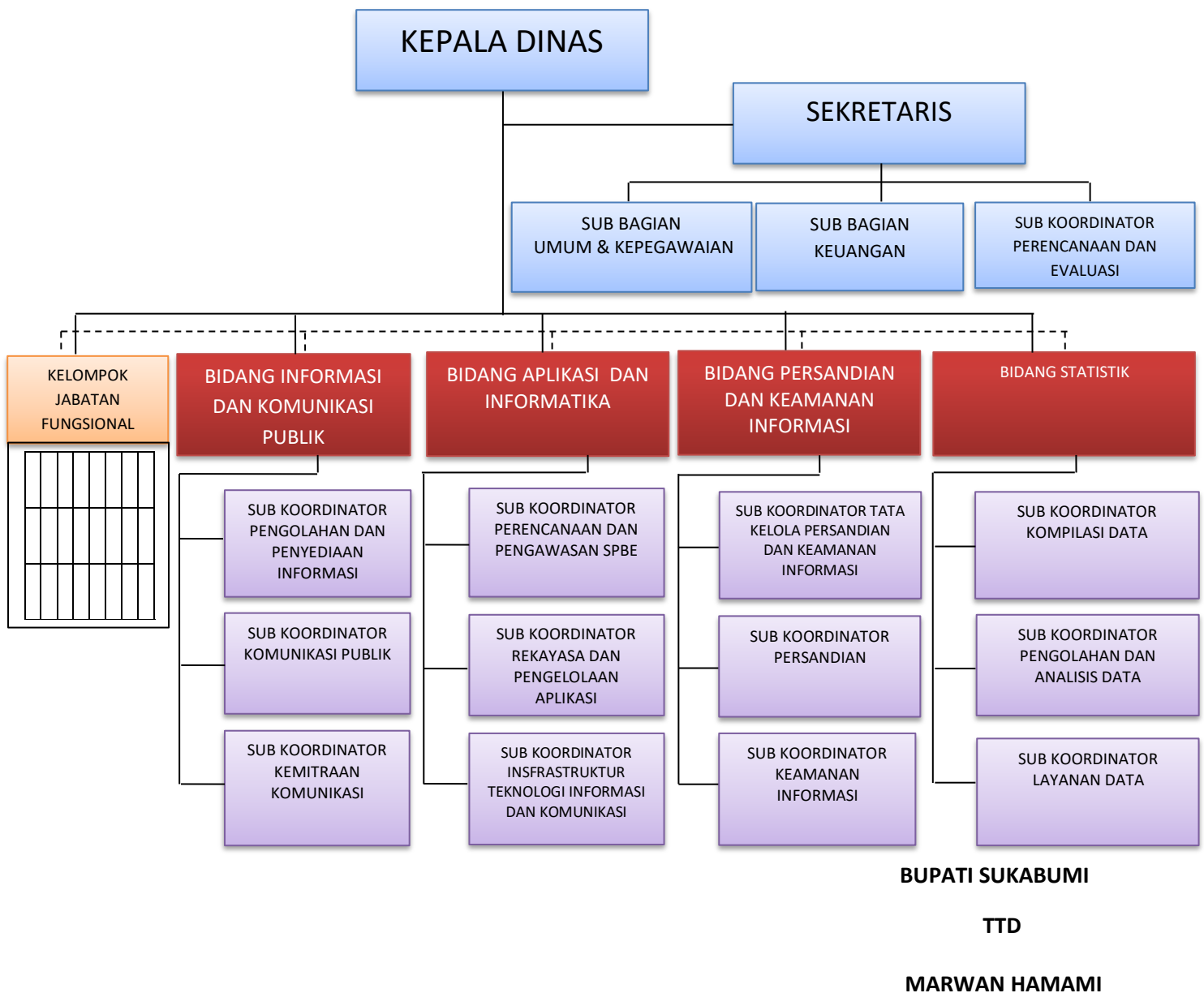
2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 78 tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi, maka struktur organisasi adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan :
 - 1. Sub Koordinator Pengelolaan dan Penyediaan Informasi;
 - 2. Sub Koordinator Komunikasi Publik; dan
 - 3. Sub Koordinator Kemitraan Komunikasi.
- d. Bidang Aplikasi dan Informatika, membawahkan :
 - 1. Sub Koordinator Perencanaan dan Pengawasan SPBE;
 - 2. Sub Koordinator Rekayasa dan Pengelolaan Aplikasi; dan
 - 3. Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- e. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, membawahkan :
 - 1. Sub Koordinator Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi;
 - 2. Sub Koordinator Persandian; dan
 - 3. Sub Koordinator Keamanan Informasi;
- f. Bidang Statistik, membawahkan :
 - 1. Sub Koordinator Kompilasi Data;
 - 2. Sub Koordinator pengolahan dan Analisis Data; dan
 - 3. Sub Koordinator Layanan Data.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1
 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten
 Sukabumi



———— GARIS KOMANDO
 - - - - - GARIS KOORDINASI

2.2 Sumber Daya Dinas

Setiap organisasi tidak terlepas dari unsur manusia sebagai pelaksananya. Pentingnya Arti sumber daya manusia adalah mengingat pada bidang tugas yang akan dilaksanakannya. Prinsip *the right man on the right job* sangat diperlukan untuk menciptakan kehandalan dan profesionalisme pegawai. Kualitas sumber daya manusia terkait erat dengan tingkat Pendidikan baik formal maupun non formal. Pendidikan formal ditempuh melalui pendidikan penjenjangan dan kursus kursus/diklat teknis bidang urusan komunikasi informatika, persandian dan statistik.



Jumlah pegawai yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi menurut latar belakang pendidikan formal dan kepangkatan adalah sebagaimana table berikut :

Tabel 2.1

Data Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

RUANG	GOLONGAN			
	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV
A			6	4
B		2	4	2
C		2	4	
D		6	10	
JUMLAH		10	24	6
	seluruh pegawai :			40

Sumber :Sub bagian Umum dan Kepegawaian DKIP Tahun 2021

Untuk memudahkan akses informasi dan pelayanan bagi masyarakat, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian juga menyediakan sarana seperti penataan akses hotspot internet di tempat-tempat strategis dan lingkungan pemerintahan dimana masyarakat umum dan pegawai pemerintahan dapat dengan mudah mengakses internet dalam rangka pelayanan masyarakat dan pelaksanaan tugas.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi selama Periode 2021-2026 ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi

Sasaran	Indikator	Satuan	Target							Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
INDIKATOR AWAL																					
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi Berbasis IT Menuju E-government	Terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen Berbasis IT	%	35	45	55	-	-	-	35	45	55	-	-	-	100	100	100	-	-	-	
	Tersedianya Fasilitas Prasarana Sarana dan Fasilitas Kominfo	Paket	1	1	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	10	10	200	-	-	-	
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan TIK	%	37	45	55	-	-	-	37	44,65	55	-	-	-	100	99,2	100	-	-	-	
	Meningkatkan Penataan dan Pengawasan Menara Telekomunikasi	%	75	80	85	-	-	-	75	79,80	85	-	-	-	100	99,7	100	-	-	-	
Meningkatkan Penyebaran Informasi Penda	Prosentase Informasi Kegiatan Pemda yang disebarluaskan melalui jalinan komunikasi dan	%	25	35	45	-	-	-	25	35	45	-	-	-	100	100	100	-	-	-	



Sasaran	Indikator	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	1	2	3	4	5	6
Terhadap Masyarakat Luas Baik Internal Maupun Eksternal Kabupaten Melalui Kerjasama dengan Media Massa Baik Media Cetak, Radio, Televisi Maupun Media Online	Kerjasama dengan media massa, baik melalui media cetak, radio, televisi maupun media online																			
Meningkatnya Penyebaran Informasi Pemda Terhadap Masyarakat Luas Baik Internal Maupun Eksternal Kabupaten Melalui Media Yang Dikelola Pemerintah Daerah (Website, Sistem Elektronik serta Media Sosial) dan Melalui Media Tradisional	Prosentase Penyampaian Informasi Publik Melalui Media Informasi yang Dikelola Pemerintah Daerah	%	25	35	45	-	-	-	25	35	45	-	-	-	100	100	100	-	-	-
	Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan Secara Elektronik (LPSE)	%	100	100	100	-	-	-	100	100	100	-	-	-	100	100	100	-	-	-
INDIKATOR REVISI																				
Meningkatnya Kualitas dan Kualitas Pelayanan Publik	Rasio Fasilitas Prasarana Sarana di Seluruh Satuan Kerja Serta Sistem Yang Terintegrasi	%	-	-	-	40	55	70	-	-	-	40	53	?	-	-	-	100	96,3	
	Persentase Jumlah Informasi yang Dipublikasikan Melalui Media yang dikelola Pemerintah Daerah, Media Massa, Media Cetak dan Media Online	%	-	-	-	90	95	100	-	-	-	90	95	?	-	-	-	100	100	

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan target dan capaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian pada Tahun 2021 pada setiap indikator dan setiap sasaran strategis sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi Berbasis IT Menuju E-Government, terdiri dari 4 indikator, uraian indikatornya adalah sebagai berikut :
 - a. Indikator Terintegrasinya Sistem Informasi Pemda Berbasis IT mulai ditetapkan pada tahun 2016 s.d 2018 dengan Target kinerja yang ditetapkan sebesar 55% dan capaian realisasi indikator kinerja pada tahun 2018 sebesar 55% memenuhi target yang telah ditetapkan dengan akumulasi pencapaian 100%. Indikator tersebut hanya berjalan 3 tahun, dikarenakan pada tahun 2019 s.d 2021 terdapat revisi indikator kinerja yang berdasarkan pada Perbub 18 tahun 2019.



- b. Indikator Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Kominfo mulai ditetapkan pada tahun 2016 s.d 2018 dengan Target kinerja yang ditetapkan sebesar 1 Paket dan capaian realisasi indikator kinerja pada tahun 2018 sebesar 1 Paket memenuhi target yang telah ditetapkan dengan akumulasi pencapaian 100%. Indikator tersebut hanya berjalan 3 tahun, dikarenakan pada tahun 2019 s.d 2021 terdapat revisi indikator kinerja yang berdasarkan pada Perbub 18 tahun 2019.
 - c. Indikator Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan TIK mulai ditetapkan pada tahun 2016 s.d 2018 dengan Target kinerja yang ditetapkan sebesar 55 % dan capaian realisasi indikator kinerja pada tahun 2018 sebesar 55 % memenuhi target yang telah ditetapkan dengan akumulasi pencapaian 100%. Indikator tersebut hanya berjalan 3 tahun, dikarenakan pada 2019 s.d 2021 terdapat revisi indikator kinerja yang berdasarkan pada Perbub 18 tahun 2019.
 - d. Indikator Meningkatkan Penataan dan Pengawasan Menara Telekomunikasi mulai ditetapkan pada tahun 2016 s.d 2018 dengan Target kinerja yang ditetapkan sebesar 85 % dan capaian realisasi indikator kinerja pada tahun 2018 sebesar 85 % memenuhi target yang telah ditetapkan dengan akumulasi pencapaian 100%. Indikator tersebut hanya berjalan 3 tahun, dikarenakan pada tahun 2019 ada perubahan kewenangan tentang Menara yang pada awalnya kewenangan Pemerintah Daerah lalu kemudian menjadi kewenangan pemerintahan pusat selain dari hal tersebut terdapat revisi indikator kinerja yang berdasarkan pada Perbub 18 tahun 2019.
2. Sasaran Strategis Meningkatkan Penyebaran Informasi Pemda Terhadap Masyarakat Luas Baik Internal Maupun Eksternal Kabupaten Melalui Kerjasama dengan Media Massa Baik Media Cetak, Radio, Televisi Maupun Media Online, terdiri dari 1 indikator, uraian indikatornya adalah sebagai berikut :
- a. Indikator Prosentase Informasi Kegiatan Pemda yang disebarluaskan Melalui Jalinan Komunikasi dan Kerjasama dengan Media Massa, Baik Melalui Media Cetak, Radio, Televisi Maupun Media Online mulai ditetapkan pada tahun 2016 s.d 2018 dengan target kinerja yang ditetapkan sebesar 45 % dan capaian realisasi indikator kinerja pada tahun 2019 sebesar 45 % memenuhi target yang telah ditetapkan dengan akumulasi pencapaian 100 %. Indikator tersebut hanya berjalan 3 tahun, dikarenakan pada tahun 2019 s.d 2021 terdapat revisi indikator kinerja yang berdasarkan pada Perbub 18 tahun 2019.



3. Sasaran Strategis Meningkatnya Penyebaran Informasi Pemda Terhadap Masyarakat Luas Baik Internal Maupun Eksternal Kabupaten Melalui Media yang Dikelola Pemerintah Daerah (Website, Sistem Elektronik Serta Media Sosial) dan Melalui Media Tradisional, terdiri dari 2 indikator, uraian indikatornya adalah sebagai berikut :
 - a. Indikator Prosentase Penyampaian Informasi Publik Melalui Media Informasi yang Dikelola Pemerintahn Daerah mulai ditetapkan pada tahun 2016 s.d 2018 dengan Target kinerja yang ditetapkan sebesar 45% dan capaian realisasi indikator kinerja pada tahun 2018 sebesar 45% memenuhi target yang telah ditetapkan dengan akumulasi pencapaian 100%. Indikator tersebut hanya berjalan 3 tahun, dikarenakan pada tahun 2019 s.d 2021 terdapat revisi indikator kinerja yang berdasarkan pada Perbub 18 tahun 2019.
 - b. Indikator Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan Secara Elektornik (LPSE) mulai ditetapkan pada tahun 2016 s.d 2018 dengan Target kinerja yang ditetapkan sebesar 100% dan capaian realisasi indikator kinerja pada tahun 2018 sebesar 100% memenuhi target yang telah ditetapkan dengan akumulasi pencapaian 100%. Indikator tersebut hanya berjalan 3 tahun, dikarenakan pada tahun 2019 Terdapat Perubahan SOTK dimana LPSE dialihkan ke Bagian Barang dan Jasa SETDA.
4. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik, terdiri dari 1 indikator, uraian indikatornya adalah sebagai berikut :
 - a. Indikator Rasio Fasilitas Prasarana Sarana di Seluruh Satuan Kerja Serta Sistem yang Terintegrasi mulai ditetapkan pada tahun 2019 s.d 2021 dengan target kinerja yang ditetapkan sebesar 70 % dan capaian realisasi indikator kinerja pada tahun 2021 sebesar 70 % memenuhi target yang telah ditetapkan dengan akumulasi pencapaian 100 %.
 - b. Indikator Jumlah Informasi yang Dipublikasikan Melalui Media yang Dikelola Pemerintah Daerah, Media Massa, Media Cetak dan Media Online mulai ditetapkan pada tahun 2019 s.d 2021 dengan target kinerja yang ditetapkan sebesar 100 % dan capaian realisasi indikator kinerja pada tahun 2021 sebesar 100 % memenuhi target yang telah ditetapkan dengan akumulasi pencapaian 100 %.



Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan
Persandian
Kabupaten Sukabumi

Uraian	Anggaran pada tahun ke						Realisasi Anggaran pada tahun ke						Rasio Realisasi Anggaran						Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Urusan Komunikasi	-	9.346.565.000	9.655.226.050	12.238.113.000	5.587.530.100	-	-	7.493.634.762	9.223.856.877	9.838.333.669	5.565.848.429	-	-	80.18	95	80.4	99.61	-	6.137.905.692	5.353.612.290
Urusan Persandian	-	-	-	-	271.405.000	-	-	-	-	-	266.920.000	-	-	-	-	-	98.34	-	271.405.000	266.920.000
Urusan Statistik	-	-	-	-	239.352.000	-	-	-	-	-	239.342.000	-	-	-	-	-	99.99	-	239.352.000	239.342.000

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

2.4.1. Peluang

Pada digitalisasi industry 4.0 ini peran bidang Komunikasi Informatika dan Persandian sangat diperlukan, terutama dalam upaya kontribusi kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi yang setiap tahunnya mengalami perkembangan yang signifikan menuntut pemerintah daerah, swasta dan masyarakat Indonesia harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kompetensi khususnya yang berbasis platform digital.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia juga merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat integrasi data seluruh instansi pemerintahan. Hasil yang sama menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 27.400 aplikasi dan 27.400 *database multi-platformm* dan *multi-standard* yang tidak terintegrasi satu sama lain, serta memiliki data tersebar. Duplikasi sistem dan aplikasi serta pembangunan pusat data dan ruang server yang *redundant* menimbulkan biaya belanja TIK pemerintahan menjadi tidak efisien.

Secara nasional, lanskap digital terus berevolusi dan berbagai upaya besar serta terarah dibutuhkan untuk mendorong perkembangan digital khususnya pada sektor publik dan swasta di Kabupaten Sukabumi. Transformasi digital menjadi salah satu prasyarat utama menuju 5 (lima) besar ekonomi, dan semakin penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat dampak dari COVID-19, namun proses ini tidak dapat dilaksanakan oleh Diskominfo saja, melainkan memerlukan sinergi dengan perangkat daerah terkait lainnya juga yang berjalan pada lanskap digital yang sama.



Berdasarkan hal diatas, maka untuk dapat memadukan transformasi digital di Indonesia khususnya Kabupaten Sukabumi secara menyeluruh sekaligus untuk menunjang visi dan misi kepala daerah terpilih. Diskominfo pada periode Renstra 2021-2026 akan berfokus pada misi ke 3 (tiga) yaitu **meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah** sebagai salah satu penunjang dalam mencapai tujuan meningkatkan pertumbuhan infrastruktur daerah yang berkualitas.

2.4.2. Tantangan

Saat ini perkembangan digitalisasi khususnya pada pemerintahan masih dalam tahap awal pelaksanaan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang tercantum pada peraturan presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), digitalisasi di pemerintahan menjadi lebih terarah dan terencana. Beberapa permasalahan pada digitalisasi pemerintahan adalah sistem dan data pemerintahan pusat dan daerah yang sebagian masih analog, dan sebagian lainnya terdigitalisasi tetapi belum terintegrasi satu sama lain. Hasil yang dilakukan tahun 2018 menyebutkan terdapat 2.700 pusat data dan ruang server milik pemerintah daerah dengan perkiraan 95% diantaranya tidak memenuhi standar. Dari sisi keamanan, terdapat potensi 65% kebocoran data karena lemahnya *system security* pusat data/ruang server dan transmisi data pada jaringan internet yang tidak diamankan, selain dari hal tersebut ketersediaan akses jaringan internet menjadi salah satu faktor penyebab pelayanan publik secara digital menjadi sulit untuk dapat di implementasikan pada wilayah-wilayah *blank spot* di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Bedasarkan penjelasan diatas peran bidang Komunikasi Informatika, Persandian dan statistik sangat diperlukan keberadaannya, hal ini menjadi tantangan yang paling utama bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian untuk dapat berperan aktif dalam mewujudkan digitalisasi pemerintahan sesuai dengan arahan presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi terlebih dahulu dengan menggali permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sukabumi berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang kemudian di formulasikan menjadi isu strategis yang merupakan permasalahan utama yang telah disepakati untuk kemudian menjadi kegiatan prioritas selama kurun waktu 5 (Lima) tahun mendatang.

Kondisi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi, antara lain :

1. Belum optimalnya penerapan teknologi tepat guna dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi daerah.
2. Belum optimalnya penerapan teknologi informasi dalam menunjang kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (*e-government*).
3. Kualitas jaringan telekomunikasi belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi, sehingga masih terdapat 115 titik yang berstatus *blank spot area*.
4. Belum optimalnya keterisian data SIPD, dimana ditargetkan terisi 70 persen tetapi belum terealisasikan
5. Masih belum meratanya akses TIK yang tersedia sebagai fasilitas penunjang pelayanan publik.
6. Masih rendahnya kapasitas masyarakat terhadap alat teknologi informasi sebagai faktor pendukung dalam era tranformasi digital.
7. Masih rendahnya tingkat kompetensi dan kualifikasi pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.
8. Sarana prasarana fasilitas dilingkungan dinas masih terbatas.
9. Masih belum meratanya pelayanan informasi ke pada masyarakat.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, berikut adalah faktor pendorong dan penghambat pelayanan Diskominfo yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, diantaranya yaitu :

a. Faktor Pendorong :

- Tersedianya sumber daya manusia yang masih produktif dan berpotensi



untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

- Mulai berjalannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menungjang pelayan publik kepada masyarakat.

b. Faktor Penghambat :

- Tidak tersedianya anggaran yang cukup memadai;
- Luas wilayah Kabupaten Sukabumi yang luas dengan topologi perbukitan menjadi permasalahan dalam pemasangan infrastruktur penunjang akses internet;
- Fasilitas Penunjang Informasi dan Komunikasi yang masih terbatas.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

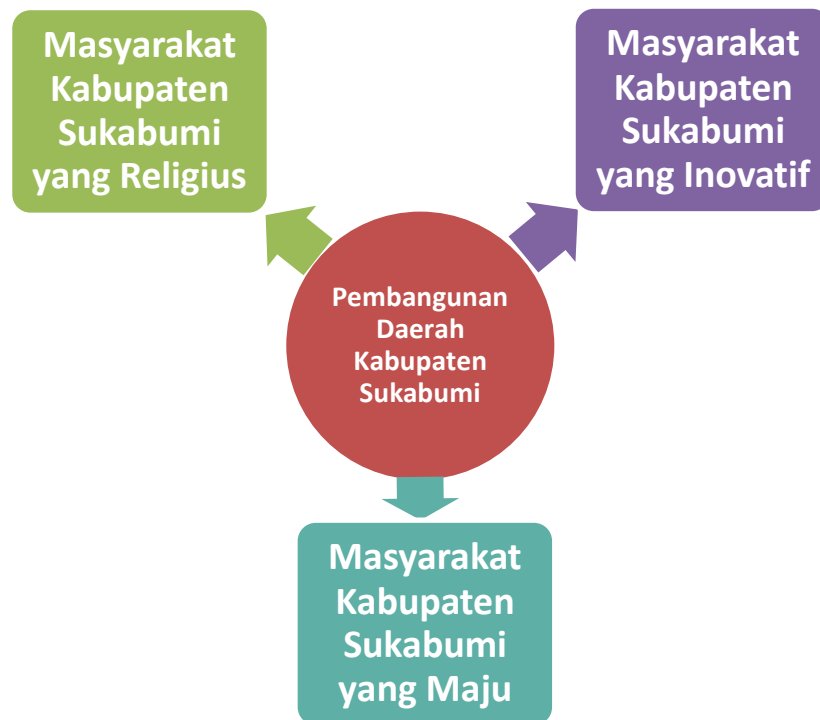
Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang telah terangkum pada isi strategis yang ada di Kabupaten Sukabumi dan mengacu pada arah pembangun yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 serta memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang dikampanyekan pada saat pemilihan umum Kepala Daerah, juga sebagai antisipasi untuk menjawab permasalahan umum daerah dimasa mendatang, maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang RELIGIUS, MAJU, dan INOVATIF Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”

Visi diatas mengandung tiga elemen penting dalam capaian pembangunan Kabupaten Sukabumi Periode 2021-2026 yakni **Religius, Maju dan Inovatif**. Dari dua elemen tersebut maka dirrtelaah bahwa Kepala Daerah ingin membangun masyarakat Kabupaten Sukabumi yang sejahtera lahir dan batin dengan tetap mempertahankan moral religiusitas, sumber daya manusia yang berdaya saing dengan inovasi – inovasi yang baru. Adapun hubungan antar elemen visi Pembangunan Kabupaten Sukabumi tergambar pada gambar berikut :



Gambar 3.1
Gambar Hubungan Antar Elemen Visi Pembangunan
Kabupaten Sukabumi



Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 tersebut, maka dirumuskan Misi Kabupaten Sukabumi. Pernyataan misi disampaikan agar tidak terjadi multi tafsir mengenai maksud realistik yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat. Pernyataan misi ini bertujuan untuk mengkomunikasikan eksistensi dan arah yang ingin dicapai. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga dapat dipandang sebagai pilihan jalan (*the Choose Track*) bagi Pemerintah Daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi *Stakeholder* pembangunan secara keseluruhan.

Suatu rumusan Misi pembangunan daerah menjadi alasan utama suatu organisasi (Pemerintah Daerah) harus dijaga oleh segenap *Stakeholders* Pembangunan. Berdasarkan identifikasi Visi pembangunan serta penjabaran secara umum, maka ditetapkan Misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing
2. Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan



3. **Meningkatkan Konektifitas Untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah**
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif , Profesional dan Akuntabel

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, maka penjelasan dari misi ke tiga di atas dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Konektifitas Untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah

Dalam rangka kontribusi penguatan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah Kabupaten Sukabumi salah satu strategi prioritas yang Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian lakukan adalah dukungan penguatan akses internet di sejumlah blankspot area yaitu 115 desa di 34 kecamatan dengan rincian sebagai tabel berikut :

Tabel 3.1
Daftar Wilayah Blank Spot
Kabupaten Sukabumi

No	Kecamatan	Desa		Keterangan	Koordinat
1	2	3		4	5
1	PALABUHANRATU	1	CIKADU	<i>Blank Spot</i>	-6.9819238,106.6052972
		2	CIBODAS	<i>Blank Spot</i>	-6.8280523,106.7340529
		3	BUNIWANGI	<i>Blank Spot</i>	-6.950322, 106.998939
		4	PASIRSUREN	<i>Blank Spot</i>	-6.986506,106.6272299
2	SIMPENAN	5	MEKARASIH	<i>Blank Spot</i>	-7.040795,106.6566144
		6	CIBUNTU	<i>Blank Spot</i>	-7.020347, 106.611405
3	CIKAKAK	7	CIMAJA	<i>Blank Spot</i>	-6.930326, 106.490538
		8	RIDOGALIH	<i>Blank Spot</i>	-6.921883, 106.505457
		9	SUKAMAJU	<i>Blank Spot</i>	-7.007785, 106.756318
		10	SIRNARASA	<i>Blank Spot</i>	-6.853972, 106.523037
		11	MARGALAKSANA	<i>Blank Spot</i>	-6.903291, 106.514111
		12	GANDASOLI	<i>Blank Spot</i>	-6.919403, 106.575710
4	BANTARGADUNG	13	CIRENDANG	<i>Blank Spot</i>	-6.952850, 108.481960
		14	BANTARGEBAH	<i>Blank Spot</i>	-7.012539, 106.669546
		15	BUANAJAYA	<i>Blank Spot</i>	-6.945555, 106.6625
5	CISOLOK	16	BOYONG SARI	<i>Blank Spot</i>	-6.963611, 106.705278
		17	SUKARAME	<i>Blank Spot</i>	-6.904510, 106.483385
		18	SIRNARESMI	<i>Blank Spot</i>	-6.976861, 106.851048
		19	GUNUNGKARAMAT	<i>Blank Spot</i>	-6.883305, 106.434788
		20	GUNUNGTANJUNG	<i>Blank Spot</i>	-6.914034, 106.434855
		21	CICADAS	<i>Blank Spot</i>	-6.855647, 106.475990
6	CIKIDANG	22	CARINGIN	<i>Blank Spot</i>	-6.925267, 106.411232
		23	GUNUNGMALANG	<i>Blank Spot</i>	-6.855934, 106.623342
		24	TAMAN SARI	<i>Blank Spot</i>	-6.914262, 106.705844
		25	CIJAMBE	<i>Blank Spot</i>	-6.928488, 106.623236
		26	BUMI SARI	<i>Blank Spot</i>	-6.926637, 106.670389
		27	PANGKALAN	<i>Blank Spot</i>	-6.875275, 106.672423



7	LENGKONG	28	LENGKONG	Blank Spot	-7.0825892,106.6340227
		29	CILANGKAP	Blank Spot	-7.1247239,106.6660587
		30	NEGLASARI	Blank Spot	-7.1296611,106.7416492
		31	LANGKAPJAYA	Blank Spot	-7.0825892,106.6340227
8	JAMPANG TENGAH	32	SINDANGRESMI	Blank Spot	-7.015719, 106.795245
		33	BOJONGJENGKOL	Blank Spot	-7.094171, 106.765073
		34	NANGERANG	Blank Spot	-7.118633, 106.812578
		35	PANUMBANGAN	Blank Spot	-7.044313, 106.835215
		36	BANTARPANJANG	Blank Spot	-7.118802, 106.776588
		37	BANTARAGUNG	Blank Spot	-7.090275, 106.729050
		38	BOJONGTIPAR	Blank Spot	-7.053333, 106.866111
9	WARUNG KIARA	39	MEKARJAYA	Blank Spot	-6.983864, 106.704269
		40	BANTARKALONG	Blank Spot	-7.033467, 106.713730
		41	SIRNAJAYA	Blank Spot	-6.999302, 106.720539
		42	HEGARMANAH	Blank Spot	-7.029617, 106.682112
		43	TARISI	Blank Spot	-7.001866, 106.690547
		44	GIRIJAYA	Blank Spot	-7.007785, 106.756318
10	CIKEMBAR	45	SUKAMAJU	Blank Spot	-6.994167, 106.768333
		46	CIBATU	Blank Spot	-6.996159, 106.798376
11	CIBADAK	47	NEGLASARI	Blank Spot	-6.903990, 106.729283
12	NAGRAK	48	KALAPAREA	Blank Spot	-6.860422, 106.822977
		49	DARMAREJA	Blank Spot	-6.866222, 106.838522
13	BOJONGGENTENG	50	BOJONGGALING	Blank Spot	-6.832222, 106.714722
		51	BERKAH	Blank Spot	-6.841944, 106.706389
14	PARAKANSALAK	52	SUKATANI	Blank Spot	-6.820727, 106.703898
		53	SUKAKERSA	Blank Spot	-6.794099, 106.696892
15	CIDAHU	54	CIDAHU	Blank Spot	-6.591156, 107.455064
		55	GIRIJAYA	Blank Spot	-6.755944, 106.738051
		56	TANGKIL	Blank Spot	-6.779513, 106.749382
16	JAMPANG KULON	57	CIKARANG	Blank Spot	-7.229455,106.6363313
		58	CIKARANGGEUSAN	Blank Spot	-7.217778, 106.657222
17	WALURAN	59	MEKAR MUKTI	Blank Spot	-7.2313222,106.5716378
		60	SUKAMUKTI	Blank Spot	-7.2132695,106.62126
		61	MANGUNJAYA	Blank Spot	-7.196944, 106.623056
18	KALIBUNDER	62	CIMAHPAR	Blank Spot	-7.309961,106.6796543
		63	SEKARSARI	Blank Spot	-7.287985,106.7154373
		64	SUKALUYU	Blank Spot	-7.2626406,106.7168962
		65	BALEKAMBANG	Blank Spot	-7.213953,106.7384283
		66	BOJONG	Blank Spot	-7.265509,106.7503323
		67	MEKARWANGI	Blank Spot	-7.2816069,106.680626
19	SURADE	68	SUKATANI	Blank Spot	-7.397376,106.5731563
		69	BUNIWANGI	Blank Spot	-7.3710414,106.5388917
		70	GUNUNGSUNGGING	Blank Spot	-7.363966,106.5764593
		71	CIPEUNDEUY	Blank Spot	-7.396589,106.5511167
		72	WANASARI	Blank Spot	-7.293043,106.5720753
20	CIRACAP	73	PANGUMBAHAN	Blank Spot	-7.3270001,106.4207974
		74	MEKARSARI	Blank Spot	-7.3059951,106.4778372
21	CICANTAYAN	75	HEGARMANAH	Blank Spot	-6.927191, 106.819823
		76	CIMANGGIS	Blank Spot	-6.936862, 106.800200



22	CARINGIN	77	SUKAMULYA	Blank Spot	-6.817161, 106.915513
		78	CARINGIN KULON	Blank Spot	-6.876987, 106.863614
		79	MEKARJAYA	Blank Spot	-6.883036, 106.852841
		80	CIKEMBANG	Blank Spot	-6.848599, 106.880618
		81	PASIR DATAR INDAH	Blank Spot	-6.844722, 106.897222
23	SUKARAJA	82	CISARUA	Blank Spot	-6.851736, 106.974457
		83	MARGALUYU	Blank Spot	-6.888012, 106.996432
		84	LANGENSARI	Blank Spot	-6.856208, 106.986060
24	CIREUNGHAS	85	BENCOY	Blank Spot	-6.957722, 107.036915
25	SUKALARANG	86	TITISAN	Blank Spot	-6.872525, 107.025403
26	PABUARAN	87	LEMBUR SAWAH	Blank Spot	-7.201944, 106.815
		88	SIRNASARI	Blank Spot	-7.160402, 106.7846073
		89	CIBADAK	Blank Spot	-7.181138, 106.8222183
		90	BANTARSARI	Blank Spot	-7.172297, 106.7512833
27	PURABAYA	91	NEGLASARI	Blank Spot	-7.127371, 106.859396
		92	CICUKANG	Blank Spot	-7.128892, 106.924227
		93	MARGALUYU	Blank Spot	-7.099167, 106.923056
28	NYALINDUNG	94	CISITU	Blank Spot	-7.060808, 106.930328
29	GEGERBITUNG	95	SUKAMANAH	Blank Spot	-7.016426, 107.036356
		96	CIENGANG	Blank Spot	-7.017336, 107.000306
		97	BUNIWANGI	Blank Spot	-6.950322, 106.998939
30	CURUG KEMBAR	98	MEKARTANJUNG	Blank Spot	-7.220278, 106.961944
		99	NAGRAKJAYA	Blank Spot	-7.174444, 106.913889
		100	TANJUNGSARI	Blank Spot	-7.213538, 106.9672643
		101	SINDANGRAJA	Blank Spot	-7.164793, 106.9394883
		102	BOJONG TUGU	Blank Spot	-7.1970669, 106.943856
31	CIDOLOG	103	CIPAMINGKIS	Blank Spot	-7.3, 106.8313803
		104	CIKARANG	Blank Spot	-7.275628, 106.8984293
32	CIDADAP	105	CIDADAP	Blank Spot	-7.2935903, 106.9370432
		106	MEKARTANI	Blank Spot	-7.307662°, 106.932798°
		107	HEGARMULYA	Blank Spot	-7.3349341, 106.8763354
		108	TENJOLAUT	Blank Spot	-7.3403943, 106.8678782
33	TEGAL BULEUD	109	BANGBAYANG	Blank Spot	-6.782195, 106.775171
		110	CALINGCING	Blank Spot	-7.380406, 106.7628223
		111	SIRNAMEKAR	Blank Spot	-7.279444, 106.751944
		112	RAMBAY	Blank Spot	-7.3428078, 106.7802542
34	CIMANGGU	113	BOREGAH INDAH	Blank Spot	-7.261305, 106.6566473
		114	SUKAJADI	Blank Spot	-7.219764, 106.6715633
		115	KARANGMEKAR	Blank Spot	-7.240806, 106.6477453

3.3 Telaahan Rentra K/L dan Renstra

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi menginduk kepada Kementerian Komunikasi & Informatika dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, adapun prioritas pembangunan berdasarkan permasalahan yang terdapat di Kementerian Komunikasi & Informatika dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :



Tabel 3.2
 Sinkronisasi Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan
 Persandian Berdasarkan Sasaran Renstra K/L
 Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian/ Lembaga	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5	6
1.	Meratanya pembangunan sarana prasarana pos, komunikasi & informatika di seluruh Indonesia	Masih terbatasnya sarana dan prasarana di beberapa daerah	Masih adanya lokasi <i>blank spot</i> sebanyak 115 desa	Wilayah topologi dan anggaran	Kerjasama dengan pihak swasta
2.	Tersedia dan tersebar informasi yang faktual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat Indonesia dalam kerangka NKRI	Masih rendahnya sinkronisasi pelaksanaan program	Penyebaran informasi belum merata kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi	Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi	Kemajuan Akses Teknologi
3.	Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal	1. Masih terbatasnya infrastruktur jaringan komunikasi data; 2. Masih rendah kemampuan komunikasi d informatika aparatur, dunia usaha dan masyarakat 3. Belum optimalnya implementasi kebijakan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika 4. Masih rendahnya Dukungan keberlanjutan	1. Masih terbatasnya infrastruktur jaringan komunikasi data; 2. Masih rendah kemampuan komunikasi d informatika aparatur, dunia usaha dan masyarakat 3. Belum optimalnya implementasi kebijakan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika		



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian/ Lembaga	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
		program dan anggaran			
4.	Tersedianya standar alat dan standar mutu layanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan pos komunikasi dan informatika	Belum tersedianya standar alat, standar mutu layanan, dan mekanisme pengawasan	Belum ada		
5.	Tersedianya layanan konten informasi yang edukatif mencerahkan dan memberdayakan masyarakat	1. Keterbatasan ketersediaan data 2. Keterbatasan anggaran 3. Perbedaan penentuan prioritas konten di daerah	Belum optimal		
6.	Tercapainya peran serta aktif masyarakat dan Lembaga komunikasi dalam penyediaan penyebaran dan kemanfaatan informasi edukatif mencerahkan dan memberdayakan masyarakat	Belum optimalnya pemanfaatan peran mitra kerja (KIM, Metra, Lembaga Penyiaran, dan Media Cetak)	Belum optimalnya pembentukan dan pemanfaatan KIM dan media		
7.	Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika	Belum optimalnya kerjasama penelitian dan pengembangan dengan lembaga penelitian/perguruan tinggi	Belum ada		
8.	Mendorong penciptaan SDM unggul di bidang komunikasi dan informatika	Adanya kesenjangan yang besar antara kebutuhan dan ketersediaan	Belum ada		



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian/ Lembaga	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
		SDM unggul			
9.	Mendorong berkembangnya industri komunikasi dan informatika yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan	Belum dijadikan prioritas	Belum ada		
10.	Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang mendorong tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi berdasarkan kearifan lokal	Belum dijadikan prioritas	Belum ada		
11.	Mendorong penguatan kapasitas produksi industri komunikasi dan informatika nasional agar mampu bersaing di dunia internasional	Belum adanya standarisasi industri dan profesional yang dapat diadopsi	Belum ada		
12.	Mendorong rasa cinta tanah air melalui penggunaan produk dalam negeri bidang komunikasi dan informatika	Dominasi keberadaan dan pemanfaatan produk non domestik	Belum ada		
13.	Membangun pencitraan positif Negara Indonesia di mata internasional	Belum dilakukan secara optimal pemanfaatan potensi bidang komunikasi dan informatika	Belum ada		

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang (RTRW) Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai berikut :



Tabel 3.4.1
Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Berserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi	1. Kewenangan Jaringan telekomunikasi adalah kewenangan Pusat	Kewenangan Pekerjaan	

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai berikut :

Tabel 3.4.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Berserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Kajian Lingkungan Hidup dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Proporsi Individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	1. Keterbatasan anggaran untuk melakukan pendataan/survey	Kesulitan Mendapatkan data lapangan	
2	Proporsi individu yang menggunakan internet (pengakses internet)	1. Keterbatasan anggaran untuk melakukan pendataan/survey	Kesulitan Mendapatkan data lapangan	
3	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	1. Keterbatasan anggaran 2. Data wilayah Broadband belum optimal	Sinkronisasi Antar Program Belum terwujud	
4	Persentase Kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses Telekomunikasi universal dan internet	1. Keterbatasan anggaran dan sumberdaya manusia	Sinkronisasi Antar Program Belum terwujud	



3.5 Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan RPJMD 2021-2026, terdapat analisis isu strategis bidang kominfo dengan penjelasan sbb:

1. Permasalahan Utama Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi :
 - a. Masih terdapat lokasi blank spot di wilayah Kabupaten Sukabumi, khususnya di 115 desa;
 - b. Masih belum optimalnya ketersediaan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai pendukung SPBE dan pelayanan publik;
 - c. Penyebarluasan Informasi terkait kebijakan pemerintah belum optimal.

2. Isu Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian:
 - a. Belum optimalnya ketersediaan akses teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung percepatan pertumbuhan wilayah.

Tabel 3.5.1
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

No	Sasaran Pokok RPJPD	Indikator dan Target RPJPD	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
1	Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan Pelayanan Komunikasi dan Informatika Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum Optimalnya Ketersediaan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Mendukung Percepatan Pertumbuhan Wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah secara cepat dan tepat • Meningkatkan ketersediaan infrastruktur komunikasi, Informatika dan keamanan persandian • Meningkatkan Kapasitas SDM di sektor informatika • Meningkatkan kualitas jaringan komunikasi untuk mendukung pencakupan area • Peningkatan Kualitas Informasi Publik • Meningkatkan pelaksanaan persandian untuk keamanan informasi • Meningkatkan kualitas dan kuantitas mutu data statistik sektoral



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya untuk mencapai visi **‘Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin’**, misi yang terkait dengan urusan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik adalah misi ke-3 yakni **‘Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah’** dengan sasaran daerah yaitu **‘Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah’**

Adapun keterkaitan antara tujuan dan sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan 4.2 berikut ini.



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (Renstra) Pelayanan Dinas Kominfo 2021 – 2026 (Eselon II)

Tujuan	Sasaran PD	Indikator	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Meningkatnya Pertumbuhan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas	1.1. Meningkatnya Ketersediaan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tersedia	14	40	55	70	85	100
	1.2. Meningkatnya Nilai Area Keamanan Informasi	Prosentase Nilai Area Keamanan Informasi	32	46	60	73	86	100
	1.3. Meningkatnya mutu data statistik sektoral dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Penggunaan Data Statistik untuk pembangunan Daerah	16	32	49	66	83	100



Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (Renstra) Pelayanan Dinas Kominfo 2021 – 2026 (Eselon III)

Tujuan	Sasaran PD	Indikator	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Meningkatnya Pertumbuhan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas	2.1. Meningkatnya Ketersediaan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase Akses TIK yang tersedia	14	31	48	65	83	100
		Persentase (%) Informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah, disampaikan secara cepat dan tepat	10	20	40	60	80	100
	2.2. Meningkatnya Nilai Area Keamanan Informasi	Prosentase Tingkat Keamanan Informasi	13	31	48	65	82	100
	2.3. Meningkatnya mutu data statistik sektoral dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Penggunaan Data Statistik untuk pembangunan Daerah	16	32	49	66	83	100



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi dengan efektif dan efisien. Strategis dan arah kebijakan merupakan salah satu sarana untuk melakukan perubahan, transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja daerah. Perencanaan yang komprehensif di susun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung capaian pembangunan. Salah satu point penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta peningkatan luas cakupan akses teknologi informasi dan komunikasi sehingga peningkatan percepatan pertumbuhan konektivitas wilayah dalam terwujud

5.1.1. Strategi

Rumusan Strategi menunjukkan Langkah dan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*Value added*) perencanaan bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Strategi merupakan Langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD. Rumusan strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Beberapa Langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi antara lain :

1. Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan;
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah)
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*Key Success Factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan (arah kebijakan dan kebijakan umum) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber



daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi, dan;

6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran RPJMD

Adapun rumusan strategi pembangunan berupa pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana secara sistematis tujuan dan sasaran pembangunan akan dicapai, diuraikan dalam penjelasan berdasarkan misi, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi.

1. MISI 3

Meningkatkan Konektifitas Untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah

Tabel 5.1
 Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran dari Misi 3
 Urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik

Tujuan No :	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3	4
3	Meningkatnya Pertumbuhan Infrastruktur Daerah yang berkualitas	Meningkatnya Luas Cakupan Wilayah Komunikasi dan Informatika	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur komunikasi, Informatika dan keamanan persandian Meningkatkan Kapasitas SDM di sektor informatika Meningkatkan kualitas jaringan komunikasi untuk mendukung pencakupan area Peningkatan Kualitas Informasi Publik Meningkatkan pelaksanaan persandian untuk keamanan informasi Meningkatkan kualitas dan kuantitas mutu data statistik sektoral

Sumber : Dokumen RPJMD 2021-2026

Pencapaian sasaran pembangunan dinas yang mengacu kepada RPJMD



ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan strategi sebagai Prioritas Pembangunan (*Strategi Focused Organization*) lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah telah Menyusun strategi pembangunan sebagaimana telah di gambarkan diatas sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun kedepan.

5.1.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupan instrument langkah-langkah dalam perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman dalam menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD, adapun fokus atau tema pembangunan Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada gambar 5.1.

Gambar 5.1
Fokus atau Tema Pembangunan Kabupaten Sukabumi
Tahun 2022 – 2026



Di samping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama dari rumusan arah kebijakan pembangunan wilayah untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Adapun hasil dari perumusan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut



Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin			
Misi : Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya pertumbuhan infrastruktur daerah yang berkualitas	Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur komunikasi, Informatika dan keamanan persandian 2. Meningkatkan Kapasitas SDM di sektor informatika 3. Meningkatkan kualitas jaringan komunikasi untuk mendukung pencakupan area 4. Peningkatan Kualitas Informasi Publik 5. Meningkatkan pelaksanaan persandian untuk keamanan informasi 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas mutu data statistik sektoral 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika diinstansi Pemerintah dalam rangka mendukung SPBE; 2. Mengembangkan Kapasitas SDM (IT) melalui pembinaan dan pelatihan sesuai bidang 3. Meningkatkan jumlah tenaga IT sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang 4. Melakukan kerjasama dengan penyedia jaringan telekomunikasi maupun penyedia layanan jaringan public 5. Pembangunan dan Pengelolaan Kanal Informasi Pusat, Daerah dan Mitra 6. Peningkatan Pengamanan Kegiatan Pemerintahan Daerah 7. Penyediaan Data Statistik Sektoral



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai visi '**Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin**', misi yang terkait dengan urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian, dan Urusan Statistik adalah misi ke-3 yakni '**Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah**', dengan sasaran '**Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah**'. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) program berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan dengan Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020, yakni sebagai berikut :

A. Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

B. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Penyelenggaraan Persandian
4. Program Penyelenggaraan Statistik

Adapun rencana pendanaan program yang berkaitan langsung dengan urusan pemerintahan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Informatika pada Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :



Tabel 6.1
Daftar Rencana Strategis Prioritas dan Penunjang Urusan Pemerintahan Beserta Pagu Indikatif
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi 2021-2026

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
2	1	0	1																	



Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		0	-	0	-	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	4 Dokumen	200		
	3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		0	-	0	-	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	4 Dokumen	200		
	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		144 Buah	350	144 Buah	350	144 Buah	350	144 Buah	350	144 Buah	350	144 Buah	350	864 Buah	2,100		
		Publikasi Konten Videotron		12 Buah	120	12 Buah	120	12 Buah	120	12 Buah	120	12 Buah	120	12 Buah	120	72 Buah	720		
		Penambahan Media Komunikasi Billboard		1 Buah	90	1 Buah	90	1 Buah	90	1 Buah	90	1 Buah	90	1 Buah	90	451 Buah	540		
		Pemeliharaan Papan Billboard		12 Buah	145	12 Buah	145	12 Buah	145	12 Buah	145	12 Buah	145	12 Buah	145	72 Buah	870		
		Pemeliharaan Videotron		1 Kali	100	1 Kali	50	1 Kali	50	1 Kali	50	1 Kali	50	1 Kali	50	6 Kali	350		
		Pengadaan Videotron		0	-	1 Buah	800	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Buah	800		



Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		0	-	0.00%	-	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	4 Dokumen	200		
	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		50 PD	120	50 PD	120	50 PD	120	50 PD	120	50 PD	120	50 PD	120	300 PD	720		
		Pemeliharaan Pemancar Radio FM		1 Kali	50	1 Kali	50	1 Kali	50	1 Kali	50	1 Kali	50	1 Kali	50	6 Kali	300		
		Pengadaan Tower Self Support Radio		0	-	1 Unit	550	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Unit	550		
		Pemeliharaan Tower Self Support		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Unit	5	1 Unit	5		
		Pengadaan Alat Studio FM		0	-	0	100	0	-	0	-	1 Paket	100	0	-	2 Paket	200		
		Tenaga Teknis Publikasi Penyiar Radio		12 Orang	425	12 Orang	425	12 Orang	425	12 Orang	425	12 Orang	425	12 Orang	425	72 Orang	2,550		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		-	-	-	-	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	4 Dokumen	200		



Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD					
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	6	Pelayanan Informasi Publik	Penyusunan Dokumen Regulasi PPID	3 Dok	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 dok	100				
			Diseminasi Penguatan Tata Kelola Adm Layanan Informasi Publik	-	-	84 PD	150	180 Desa	150	180 Desa	150	-	-	-	-	-	444 PD dan Desa	450			
			Sosialisasi Regulasi PPID	2 kali	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 kali	100			
			Rapat Evaluasi Pelayanan Informasi Lintas Sektor	1 kali	50	1 kali	50	1 kali	50	1 kali	50	1 kali	50	1 kali	50	1 kali	50	6 kali	300		
			Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Layanan Informasi Publik	1 dok	50	1 dok	50	1 dok	50	1 dok	50	1 dok	50	1 dok	50	1 dok	50	6 dok	300		
			Monitoring Kinerja Layanan Informasi Publik	12 bulan	15	12 bulan	15	12 bulan	15	12 bulan	15	12 bulan	15	12 bulan	15	12 bulan	15	72 bulan	90		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik		0	-	0	-	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	4 Dokumen	200				



Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	7	Layanan Hubungan Media	Komunikasi Lintas SKPD Sebagai Informasi Untuk di Publikasikan terkait Program-Program Kerja SKPD (Liputan)		120 buah	320	120 buah	320	120 buah	320	120 buah	320	120 buah	320	120 buah	320	720 Buah	1,920		
			Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Tahunan		1 Buah	75	1 Buah	75	1 Buah	75	1 Buah	75	1 Buah	75	1 Buah	75	6 Buah	450		
			Pengadaan Alat Studio Foto/Video		1 Paket	120	1 Paket	120	1 Paket	120	1 Paket	120	1 Paket	120	1 Paket	120	6 Paket	720		
			Tenaga Teknis Peliputan		9 Orang	320	9 Orang	320	9 Orang	320	9 Orang	320	9 Orang	320	9 Orang	320	54 Orang	1,920		
			Jumlah Layanan Hubungan Media		0	-	0	-	1 Layana	50	1 Layana	50	1 Layana	50	1 Layana	50	4 layanan	200		
	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan PemangkuKepentingan		0	-	0	-	1 Dokum	50	1 Dokum	50	1 Dokum	50	1 Dokum	50	4 Dokum	200		
	9	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis		0	-	0	-	1 Dokum	50	1 Dokum	50	1 Dokum	50	1 Dokum	50	4 Dokum	200		



Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Pendampingan Kelompok Informasi Masyarakat		4 KIM	50	4 KIM	50	4 KIM	50	4 KIM	50	4 KIM	50	4 KIM	50	24 Orang	300		
			Rapat Evaluasi Kontribusi Kelompok Informasi Masyarakat dalam Menyebarkan Informasi		4 kali	50	4 kali	50	4 kali	50	4 kali	50	4 kali	50	4 kali	50	24 Kali	300		
			Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya		0	-	0	-	100 Orang	50	100 Orang	50	100 Orang	50	100 Orang	50	400 Orang	200		
	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah		0	-	0	-	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	4 Dokumen	200		
	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Publikasi di Media Massa, Cetak, Online dan Media Elektronik		1140 Buah Berita	2,115	1140 Buah Berita	2,115	2280 Buah Berita	2,115	2280 Buah Berita	2,115	2280 Buah Berita	2,115	2280 Buah Berita	2,115	11400 Buah Berita	12,690		



Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan		0	-	0	-	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	4 Dokumen	200			
	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		0	-	0	-	1 Unit	100	1 Unit	100	1 Unit	100	1 Unit	100	4 Unit	400			
		Program aplikasi informatika	Persentase Akses TIK yang tersedia	14%	14%	3,370	31%	13,382	48%	37,275	65%	36,655	83%	37,100	100%	36,610	100%	164,394	DKIP	
	a	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi		0	1,975	16	11,280	17	33,580	17	33,555	17	33,430	17	33,430	84	147,252		



Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah desa dan kelurahan yang didaftarkan untuk mendapatkan domain		18Desa	75	72 Desa	150	72 Desa	150	73 Desa	75	73 Desa	-	73 Desa	-	381 Desa	450		
			Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota		0	-	0	-	1 Domain	150	1 Domain	150	1 Domain	150	1 Domain	150	4 Domain	600		
	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Laporan Monitoring dan kedayagunaan nama domain / sub domain		2 Dok	0.25	2 Dok	0.25	2 Dok	0.25	2 Dok	0.25	2 Dok	0.25	2 Dok	0.25	12 Dok	2		
			Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		0	-	0	-	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	4 Dokumen	200		



Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan IntraPemerintah Daerah	Jumlah sistem informasi untuk penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain	0	-	0	-	0	-	1 Aplikasi	50	0	-	0	-	1 Aplikasi	50		
			Jumlah Pengadaan Tower Pusat dan Kawasan penanganan BlankSpot	1 Tower Pusat	500	7 Tower Kawasan	700	7 Tower Kawasan	700	7 Tower Kawasan	700	7 Tower Kawasan	700	6 Tower Kawasan	700	1 Tower Pusat & 34 Tower Kawasan	4,000		
			Biaya Operasional dan Pelatihan tim teknis	12 Bulan	250	12 Bulan	250	12 Bulan	250	12 Bulan	250	12 Bulan	250	12 Bulan	250	72 Bulan	1,500		
			Jumlah Pengadaan Tower Penerima Penanganan Kawasan BlankSpot			23 Tower Penerima	230	23 Tower Penerima	230	23 Tower Penerima	230	23 Tower Penerima	230	23 Tower Penerima	230	115 Tower Penerima	1,150		
			Jumlah Gedung Pusat Data sesuai standar Ruang server			1 Unit/ Gedung Server	6,000									1 Unit/ Gedung Server	6,000		
			Jumlah Koneksi VPN dan Aktivasi	7 PD	100	7 PD	600	7 PD	600	7 PD	600	7 PD	600	7 PD	600	42 PD	3,100		



Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Dok Kajian Jaringan Intra Pemda Kabupaten Sukabumi dan Wilayah Blankspot		1 Dok	200	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Dok	200		
		Pembangunan jaringan FO Wilayah Palabuhanratu		0	-	8 KM	2,500	120 Km	30,000	120 Km	30,000	120 Km	30,000	120 Km	30,000	488 Km	122,500		
		BOP dan Pelatihan TIM Jaringan		12 Bulan	250	12 Bulan	250	12 Bulan	250	12 Bulan	250	12 Bulan	250	12 Bulan	250	72 Bulan	1,500		
		Pemasangan Wifi Gratis		11 Titik	600	11 Titik	600	11 Titik	600	11 Titik	600	11 Titik	600	11 Titik	600	66 Titik	3,600		
		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		0	-	0	-	1 Unit	600	1 Unit	600	1 Unit	600	1 Unit	600	4 Unit	2,400		
	b	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		0	1,395	6 Dok	2,102	1 Dok	3,695	0	3,100	3 Dok	3,670	0	3,180	10 Dok	17,142		
	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		0	-	0	-	0	-	0	-	1 Dok	250	0	-	1 Dok	250		



Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		0	-	0	-	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	4 Dokumen	400		
	2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sukabumi (Roadmap SPBE)		0	-	1 Dok	200	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Dok	200		
		Dokumen Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik Kabupaten Sukabumi (Manajemen Resiko SPBE)		0	-	0	-	1 Dok	350	0	-	0	-	0	-	1 Dok	350		



Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		0	-	0	-	1 Dok	100	1 Dok	100	1 Dok	100	1 Dok	100	4 Dokumen	400		
	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		0	-	0	-	1 Unit	500	1 Unit	500	1 Unit	500	1 Unit	500	4 Unit	2,000		
	4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		0	-	0	-	1 Dokumen	200	1 Dokumen	200	1 Dokumen	200	1 Dokumen	200	4 Dokumen	800		



Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen Panduan tentang Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi di Dalam Pembangunan dan Pengembangan Sistem / Aplikasi Lingkup Kabupaten Sukabumi		0	-	1 Dok	50	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Dok	50		
		Jumlah Peserta Workshop Dalam Giat Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	50 Peserta	100	50 Peserta	100			
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi		0	-	0	-	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	4 Dokumen	400			
	6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Sewa Rak Server		3 Bulan	850	-	750	-	400	-	400	-	750	-	400	3 Bulan	3,550		



Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Dokumen Perencanaan Integrasi dan Interoperabilitas Pemerintah Sistem Elektronik Kabupaten Sukabumi		0	-	1 Dok	-	0	-	0	-	1 Dok	-	0	-	0	-		
		Dokumen Peraturan Kepala Daerah Tekait Implementasi Integrasi dan Interoperabilitas Sistem Elektronik Kabupaten Sukabumi		0	-	1 Dok	-	0	-	0	-	1 Dok	-	0	-	2 Dok	-		
		Jumlah Peserta Workshop/FGD Implementasi Integrasi dan Interoperabilitas Sistem Elektronik Pemerintah Kabupaten Sukabumi		110 Peserta	-	220 Peserta	-	220 Peserta	-	220 Peserta	-	220 Peserta	-	220 Peserta	-	990 Peserta	-		
		Jumlah Peserta Rapat Teknis Integrasi dan Interoperabilitas Sistem Elektronik Kabupaten Sukabumi		600 Peserta	-	600 Peserta	-	600 Peserta	-	600 Peserta	-	600 Peserta	-	600 Peserta	-	3600 Peserta	-		



Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		0	-	0	-	84 PD	100	84 PD	100	84 PD	100	84 PD	100	336 PD	400		
	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen Aturan Panduan Penyusunan Pembangunan, Pengembangan dan Proses Bisnis Aplikasi	0	-	1 Dok	50	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Dok	50		
		Jumlah Peserta Rapat Sosialisasi Aturan Penyusunan Pembangunan, Pengembangan dan Proses Bisnis Aplikasi		0	-	0	-	100 Orang	150	0	-	0	-	0	-	100 Orang	150		
		Jumlah Peserta Pelatihan Operator Web Kecamatan dan Non Kecamatan		0	-	84 Orang	100	0	-	0	-	0	-	0	-	84 Orang	100		
		Jumlah Peserta Pelatihan Operator Web Desa		0	-	0	-	193 Orang	200	193 Orang	200	0	-	0	-	386 Orang	400		



Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Jumlah sistem / aplikasi yang dibangun / dikembangkan		0	-	3 aplikasi / web / SI	5	4 aplikasi / web / SI	5	4 aplikasi / web / SI	5	4 aplikasi / web / SI	5	4 aplikasi / web / SI	5	15 aplikasi / web / SI	25		
		Ketersediaan sarana dan prasarana untuk pengembangan dan pengelolaan aplikasi		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		0	-	0	-	1 Unit	100	1 Unit	100	1 Unit	100	1 Unit	100	4 Unit	400		
	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		0	-	0	-	1 Layana	100	1 Layana	100	1 Layana	100	1 Layana	100	4 Layana	400		
	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		0	-	1 Dok	300	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Dok	300		



Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Jumlah peserta rapat sosialisasi Aturan Perencanaan Kota Cerdas		0	-	0	-	100 Orang	150	0	-	0	-	0	-	100 Orang	150		
		Jumlah sistem / aplikasi yang dibangun / dikembangkan		0	-	2 Aplikasi	50	2 Aplikasi	50	2 Aplikasi	50	2 Aplikasi	50	2 Aplikasi	50	10 Aplikasi	250		
		Jumlah Peserta pelatihan ekosistem kota cerdas		0	-	-	-	-	-	100 Orang	100	200 Orang	200	200 Orang	200	500 Orang	500		
		Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City		0	-	-	-	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	4 Dokumen	400		
	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		3 Tenaga IT	180	3 Tenaga IT	180	4 Tenaga IT	250	5 Tenaga IT	290	6 Tenaga IT	360	7 Tenaga IT	400	28 Tenaga IT	1,660		
		Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Managerial di Bidang IT		36 Kali	365	37 Kali	342	36 Kali	365	30 kali	280	30 Kali	280	36 Kali	250	205	1,882		



Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		0	0	0	0	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	4 Dokumen	400		
	1 1	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		0	-	0	-	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	4 Dokumen	400		
	1 2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE		0	-	110 Orang	55	110 Orang	55	110 Orang	55	110 Orang	55	110 Orang	55	550 Orang	275		
		Jumlah peserta rapat koordinasi Tim Pengarah Penyelenggaraan SPBE		0	-	180 Peserta	10	180 Peserta	10	180 Peserta	10	180 Peserta	10	180 Peserta	10	900 Peserta	50		
		Jumlah peserta rapat koordinasi Tim Evaluator Internal Pelaksanaan Evaluasi SPBE		0	-	180 Peserta	10	180 Peserta	10	180 Peserta	10	180 Peserta	10	180 Peserta	10	900 Peserta	50		



Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE		0	-	0	0	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	4 Dokumen	400		
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Prosentase Tingkat Keamanan Informasi	13%	13%	570	31%	1,120	48%	1,399	65%	1,199	82%	1,201	100%	1,201	100%	6,690	DKIP	
	a Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Sertifikat Elektronik		88 SE	505	255 SE	960	255 SE	1,189	255 SE	1,039	255 SE	1,041	259 SE	1,041	1367 SE	5,775		
	1 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Regulasi Keamanan Informasi		1 Dok	50	1 Dok	50	1 Dok	50	1 Dok	50	1 Dok	50	1 Dok	50	6 Dok	300		
		Rapat Pembahasan Draft Perbub Keamanan Informasi		4 kali	50	4 kali	50	4 kali	50	4 kali	50	4 kali	50	4 kali	50	24 Kali	300		



Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Pembahasan Tim C-Sirt		4 Kali	50	4 Kali	50	4 Kali	50	4 Kali	50	4 Kali	50	4 Kali	50	24 Kali	300		
		Pembentukan Tim C-Sirt		1 kali	50	1 kali	50	1 kali	50							3 Kali	150		
		Koordinasi Penyusunan Perbub Keamanan Informasi		10 kali	5	10 kali	5	10 kali	5	10 kali	5	10 kali	5	10 kali	5	60 Kali	30		
		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		0	-	0	-	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	4 Dokumen	200		
	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1 kali	10	2 Kali	20	2 Kali	20	2 Kali	20	2 Kali	20	2 Kali	20	11 Kali	110		
		Jumlah Diklat IT personil PD		1 kali	10	2 kali	20	2 kali	20	2 kali	20	2 kali	20	2 kali	20	11 Kali	110		



Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Koordinasi lintas PD dan Pusat		10 kali	5	10 kali	5	10 kali	5	10 kali	5	10 kali	5	10 kali	5	60 Kali	30		
		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		0	-	0	-	1 Laporan	50	1 Laporan	50	1 Laporan	50	1 Laporan	50	4 Laporan	200		
	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		6 Aplikasi	150	23 Aplikasi	575	22 Aplikasi	550	22 Aplikasi	550	22 Aplikasi	550	22 Aplikasi	550	117 Aplikasi	2,925		
		Pelaksanaan Sterilisasi ruangan pimpinan/Contra Penginderaan		2 kali	5	2 kali	5	2 kali	5	2 kali	5	3 kali	7	3 Kali	7	14 Kali	34		
		Pelaksanaan Index Keamanan Informasi		1 kali	2	1 kali	2	2 kali	4	2 kali	4	2 kali	4	2 kali	4	10 Kali	20		
		Pelaksanaan/ integrasi sistem elektronik		1 kali	2	1 kali	2	2 kali	4	2 kali	4	2 kali	4	2 kali	4	10 Kali	20		



Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Pengadaan/penam bahan sertifikat elektronik		88 SE	5	255 SE	15	255 SE	15	255 SE	15	255 SE	15	259 SE	15	1367 SE	80		
		Koordinasi kegiatan ke lintas PD dan pusat		20 Kali	1	20 Kali	1	20 Kali	1	20 Kali	1	20 Kali	1	20 Kali	1	60 Kali	6		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		0	-	0	-	1 Laporan	50	1 Laporan	50	1 Laporan	50	1 Laporan	50	4 Laporan	200		
	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1 unit	100	1 unit	100	1 unit	100	0	-	0	-	0	-	3 Unit	300		
		Koordinasi Layanan Persandian		20 kali	10	20 kali	10	20 kali	10	20 kali	10	20 kali	10	20 kali	10	120 Kali	60		
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		0	-	0	-	84 PD	100	84 PD	100	84 PD	100	84 PD	100	336 PD	400		



Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	b	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pola Hubungan Sandi yang di tetapkan dan pemeliharaannya		1 Jks	65	1 Jks	160	1 Jks	210	0	160	0	160	0	160	3 Jks	915		
	1	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembahasan Jaringan Komunikasi Sandi		1 kali	10	5 kali	100	5 kali	100	5 kali	100	5 kali	100	5 kali	100	36 Kali	510		
			Pembentukan jaring komunikasi Sandi		1 JKS	50	1 JKS	50	1 JKS	50	0	-	0	-	0	-	3 JKS	150		
			Koordinasi lintas PD dan pusat		10 kali	5	20 kali	10	20 kali	10	20 kali	10	20 kali	10	20 kali	10	110 Kali	55		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi		0	-	0	-	84 PD	50	84 PD	50	84 PD	50	84 PD	50	336 PD	200		
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Prosentase Data Statistik Sektoral yang di update secara berkala	16%	16%	700	32%	1,100	49%	1,500	66%	1,500	83%	1,500	100%	1,500	100%	7,800	DKIP	



Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
a	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah Buku Statistik Sektoral		200	700	200	1,100	200	1,500	200	1,500	200	1,500	200	1,500	1200	7,800			
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Penyusunan Buku Profil Daerah		200 Buku	100	200 Buku	100	200 Buku	100	200 Buku	100	200 Buku	100	200 Buku	100	12000 buku	600			
		Buku statistik sektoral kab. Sukabumi		200 Buku	100	200 Buku	100	200 Buku	100	200 Buku	100	200 Buku	100	200 Buku	100	12000 Buku	600			
		Buku potensi pariwisata dan potensi pertanian		200 Buku	100	200 Buku	100	200 Buku	100	200 Buku	100	200 Buku	100	200 Buku	100	12000 Buku	600			
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral						1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	4 Dokumen	400			



Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Bimbingan Teknis Pengelola Statistik		5 Kali	100	5 Kali	100	5 Kali	100	5 Kali	100	5 Kali	100	5 Kali	100	30 Kali	600		
		Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		0	-	0	-	100 Orang	100	100 Orang	100	100 Orang	100	100 Orang	100	400 Orang	400			
	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Dokumen Metadata Sektoral		1 Dok	300	1 Dok	300	0	-	0	-	0	-	0	-	2 Dok	600		
		Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun		0	-	0	-	1 Dok	300	1 Dok	300	1 Dok	300	1 Dok	300	6 Dok	1,200			
	4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Bimtek Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		0	-	100 Orang	250	100 Orang	250	100 Orang	250	100 Orang	250	100 Orang	250	0	1,250		



Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD						
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)					
4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS		0	-	0	-	100 Orang	100	100 Orang	100	100 Orang	100	100 Orang	100	100 Orang	100	400 Orang	400			
	5	Pengembangan Infrastruktur	Pengembangan Infrastruktur Statistik	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
		Jumlah Infrastruktur Statistik		0	-	1 Unit	100	1 Unit	100	1 Unit	100	1 Unit	100	1 Unit	100	1 Unit	100	5 Unit	500			
	6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Operasional Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	0	-	12 Bulan	50	12 Bulan	50	12 Bulan	50	12 Bulan	50	12 Bulan	50	12 Bulan	50	60 bulan	250			
		Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun		0	-	0	-	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	4 Dokumen	400			

Cikembang, 29 Oktober 2021

Kepala Dinas

Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kabupaten Sukabumi

EKA NANDANG NUGRAHA, S.I.P., MM

Pembina Tk.1 IV/b
NIP.19670903 199601 1 001



Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD						
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)					
4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
2	1	0	1																			
				a	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	150	100%	150	100%	150	100%	150	100%	175	100%	925	DKI P		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	100%	150	100%	150	100%	150	100%	150	100%	175	100%	925			
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen	50	4 Dokumen	50	4 Dokumen	50	4 Dokumen	50	4 Dokumen	50	5 Dokumen	75	25 Dokumen	325	
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	6 Dokumen	60	
				3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	6 Dokumen	60	



Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Targe t	Rp (juta)	Targe t	Rp (juta)	Targe t	Rp (juta)	Targe t	Rp (juta)	Targe t	Rp (juta)	Targe t	Rp (juta)	Targe t	Rp (juta)		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Doku men	10	1 Doku men	10	1 Doku men	10	1 Doku men	10	1 Doku men	10	1 Doku men	10	6 Doku men	60		
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Doku men	10	1 Doku men	10	1 Doku men	10	1 Doku men	10	1 Doku men	10	1 Doku men	10	6 Doku men	60		
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Doku men	50	3 Doku men	50	3 Doku men	50	3 Doku men	50	3 Doku men	50	3 Doku men	50	18 Doku men	300		
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Doku men	10	1 Doku men	10	1 Doku men	10	1 Doku men	10	1 Doku men	10	1 Doku men	10	6 Doku men	60		



Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD					
				Targe t	Rp (juta)	Targe t	Rp (juta)	Targe t	Rp (juta)	Targe t	Rp (juta)	Targe t	Rp (juta)	Targe t	Rp (juta)	Targe t	Rp (juta)				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	b Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	100%	6,195	100%	6,195	100%	6,195	100%	6,195	100%	6,195	100%	6,195	100%	6,195	100%	37,170		
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bulan	6,000	12 Bulan	6,000	12 Bulan	6,000	12 Bulan	6,000	12 Bulan	6,000	12 Bulan	6,000	12 Bulan	6,000	72 Bulan	36,000		
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	35	1 Dokumen	35	1 Dokumen	35	1 Dokumen	35	1 Dokumen	35	1 Dokumen	35	1 Dokumen	35	6 Dokumen	210		
	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	35	1 Dokumen	35	1 Dokumen	35	1 Dokumen	35	1 Dokumen	35	1 Dokumen	35	1 Dokumen	35	6 Dokumen	210		
	4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 Dokumen	35	1 Dokumen	35	1 Dokumen	35	1 Dokumen	35	1 Dokumen	35	1 Dokumen	35	1 Dokumen	35	6 Dokumen	210		
	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	35	1 Laporan	35	1 Laporan	35	1 Laporan	35	1 Laporan	35	1 Laporan	35	1 Laporan	35	6 Laporan	210		



Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1 Laporan	35	1 Laporan	35	1 Laporan	35	1 Laporan	35	1 Laporan	35	1 Laporan	35	6 Laporan	210		
	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4 Laporan	10	4 Laporan	10	4 Laporan	10	4 Laporan	10	4 Laporan	10	4 Laporan	10	24 Laporan	60		
	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	6 Dokumen	60		
	c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	100%	130	100%	130	100%	130	100%	130	100%	130	100%	130	100%	780		
	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	6 Dokumen	90		



Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	6 Dokumen	90		
	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 laporan	15	1 laporan	15	1 laporan	15	1 laporan	15	1 laporan	15	1 laporan	15	6 Laporan	90		
	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	25	1 Laporan	25	1 Laporan	25	1 Laporan	25	1 Laporan	25	1 Laporan	25	6 Laporan	150		
	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	25	1 Laporan	25	1 Laporan	25	1 Laporan	25	1 Laporan	25	1 Laporan	25	6 Laporan	150		
	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	20	1 Laporan	20	1 Laporan	20	1 Laporan	20	1 Laporan	20	1 Laporan	20	6 Laporan	120		
	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	6 Dokumen	90		
	d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100%	100%	15,600	100%	19,100	100%	19,100	100%	19,600	100%	19,100	100%	15,600	100%	108,100		



Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
				Targe t	Rp (juta)	Targe t	Rp (juta)	Targe t	Rp (juta)	Targe t	Rp (juta)	Targe t	Rp (juta)	Targe t	Rp (juta)	Targe t	Rp (juta)			
4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		10 Unit	15	10 Unit	15	10 Unit	15	10 Unit	15	10 Unit	15	10 Unit	15	60 Unit	90		
	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		3 Paket	250	3 Paket	250	3 Paket	250	3 Paket	250	3 Paket	250	3 Paket	250	18 Paket	1,500		
	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		2 Dokumen	20	2 Dokumen	20	2 Dokumen	20	2 Dokumen	20	2 Dokumen	20	2 Dokumen	20	12 Dokumen	120		
	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	6 Dokumen	90		
	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	6 Dokumen	90		
	6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan		1 Orang	10	1 Orang	10	1 Orang	10	1 Orang	10	1 Orang	10	1 Orang	10	6 Orang	60		
	7	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		1 Laporan	10	1 Laporan	10	1 Laporan	10	1 Laporan	10	1 Laporan	10	1 Laporan	10	6 Laporan	60		
	8	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan		1 Orang	5	1 Orang	5	1 Orang	5	1 Orang	5	1 Orang	5	1 Orang	5	6 Orang	30		



Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
				Targe t	Rp (juta)	Targe t	Rp (juta)	Targe t	Rp (juta)	Targe t	Rp (juta)	Targe t	Rp (juta)	Targe t	Rp (juta)	Targe t	Rp (juta)			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		25 Orang	300	25 Orang	300	25 Orang	300	25 Orang	300	25 Orang	300	25 Orang	300	150 Orang	1,800			
	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		100 Orang	100	100 Orang	100	100 Orang	100	100 Orang	100	100 Orang	100	100 Orang	100	600 Orang	600			
	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		100 Orang	50	100 Orang	50	100 Orang	50	100 Orang	50	100 Orang	50	100 Orang	50	600 Orang	300			
	e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	100%	100%	1,580	100%	1,580	100%	1,580	100%	1,580	100%	1,580	100%	1,580	100%	9,480		
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	200	1 Paket	200	1 Paket	200	1 Paket	200	1 Paket	200	1 Paket	200	6 Paket	1,200		
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	250	2 Paket	250	2 Paket	250	2 Paket	250	2 Paket	250	2 Paket	250	12 Paket	1,500		
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	100	1 Paket	100	1 Paket	100	1 Paket	100	1 Paket	100	1 Paket	100	6 Paket	600		



Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Targe t	Rp (juta)	Targe t	Rp (juta)	Targe t	Rp (juta)	Targe t	Rp (juta)	Targe t	Rp (juta)	Targe t	Rp (juta)	Targe t	Rp (juta)		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	350	1 Paket	350	1 Paket	350	1 Paket	350	1 Paket	350	1 Paket	350	6 Paket	2,100		
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	200	1 Paket	200	1 Paket	200	1 Paket	200	1 Paket	200	1 Paket	200	6 Paket	1,200		
	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	6 Dokumen	90		
	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20	1 Paket	20	1 Paket	20	1 Paket	20	1 Paket	20	1 Paket	20	6 Paket	120		
	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	20	1 Laporan	20	1 Laporan	20	1 Laporan	20	1 Laporan	20	1 Laporan	20	6 Laporan	120		
	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	350	1 Laporan	350	1 Laporan	350	1 Laporan	350	1 Laporan	350	1 Laporan	350	6 Laporan	2,100		
	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	25	1 Dokumen	25	1 Dokumen	25	1 Dokumen	25	1 Dokumen	25	1 Dokumen	25	6 Dokumen	150		
	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	6 Dokumen	300		



Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	100%	875	100%	2,625	100%	2,625	100%	2,875	100%	2,625	100%	875	100%	12,500		
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			5 Unit	1,500	5 Unit	1,500			5 Unit	1,500			30 Unit	4,500			
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			5 Unit	250	5 Unit	250			5 Unit	250				750			
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		12 Bulan	25	12 Bulan	25	12 Bulan	25	12 Bulan	25	12 Bulan	25	12 Bulan	25	72 Bulan	150		
4	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		20 Unit	100	20 Unit	100	20 Unit	100	20 Unit	100	20 Unit	100	20 Unit	100	120 Unit	600		
5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10 Unit	150	10 Unit	150	10 Unit	150	10 Unit	150	10 Unit	150	10 Unit	150	60 Unit	900		
6	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		1 Unit	150	1 Unit	150	1 Unit	150	1 Unit	150	1 Unit	150	1 Unit	150	6 Unit	900		
7	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		1 Unit	100	1 Unit	100	1 Unit	100	1 Unit	100	1 Unit	100	1 Unit	100	6 Unit	600		



Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	8	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								1 Unit	2,000					1 Unit	2,000		
	9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	250	1 Unit	250	1 Unit	250	1 Unit	250	1 Unit	250	1 Unit	250	6 Unit	1,500		
	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	100	1 Unit	100	1 Unit	100	1 Unit	100	1 Unit	100	1 Unit	100	6 Unit	600		
	g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	100%	100%	4,950	100%	4,950	100%	4,950	100%	4,950	100%	4,950	100%	4,950	100%	29,700		
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	10	1 Laporan	10	1 Laporan	10	1 Laporan	10	1 Laporan	10	1 Laporan	10	6 Laporan	60		
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	700	1 Laporan	700	1 Laporan	700	1 Laporan	700	1 Laporan	700	1 Laporan	700	6 Laporan	4,200		



Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	150	1 Laporan	150	1 Laporan	150	1 Laporan	150	1 Laporan	150	1 Laporan	150	6 Laporan	900		
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	2,500	1 Laporan	2,500	1 Laporan	2,500	1 Laporan	2,500	1 Laporan	2,500	1 Laporan	2,500	6 Laporan	15,000		
	h	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100%	100%	795	100%	795	100%	795	100%	795	100%	795	100%	795	100%	4,770		
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		21 Unit	350	21 Unit	350	21 Unit	350	21 Unit	350	21 Unit	350	21 Unit	350	126 Unit	2,100		
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		20 Unit	200	20 Unit	200	20 Unit	200	20 Unit	200	20 Unit	200	20 Unit	200	120 Unit	1,200		
	3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		1 Unit	15	1 Unit	15	1 Unit	15	1 Unit	15	1 Unit	15	1 Unit	15	6 Unit	90		



Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	50	1 Unit	50	1 Unit	50	1 Unit	50	1 Unit	50	1 Unit	50	6 Unit	300		
	5	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	15	1 Unit	15	1 Unit	15	1 Unit	15	1 Unit	15	1 Unit	15	6 Unit	90		
	6	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	15	1 Unit	15	1 Unit	15	1 Unit	15	1 Unit	15	1 Unit	15	6 Unit	90		
	7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50	1 Unit	50	1 Unit	50	1 Unit	50	1 Unit	50	1 Unit	50	6 Unit	300		
	8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50	1 Unit	50	1 Unit	50	1 Unit	50	1 Unit	50	1 Unit	50	6 Unit	300		



Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	50	1 Unit	50	1 Unit	50	1 Unit	50	1 Unit	50	1 Unit	50	6 Unit	300		

Cikembang,, 29 Oktober 2021

Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kabupaten Sukabumi

EKA NANDANG NUGRAHA, S.IP.,

MM
Pembina Tk.1 IV/b
NIP.19670903 199601 1 001



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Indikator kinerja yang ada didalam Rencana Strategis (RENSTRA) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, maka dari itu apa yang dijabarkan dalam Renstra bertujuan untuk menguraikan Langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut merupakan tabel indikator kinerja yang mengacu pada sasaran RPJMD :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Bidang urusan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Cakupan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tersedia	14	40	55	70	85	100	100	Komunikasi & Informatika
2	Prosentase Nilai Area Keamanan Informasi	32	46	60	73	86	100	100	Persandian
3	Persentase Penggunaan Data Statistik untuk pembangunan Daerah	16	32	49	66	83	100	100	Statistik



Selain indikator kinerja yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi memiliki target capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat pengukuran tingkat keberhasilan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Berikut merupakan tabel 7.2 target capaian Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) :



Tabel 7.2

Target Capaian Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Tahun 2022 – 2026

No	Urusan	No IKK	IKK Outcome	Satuan	Target					No IKK	IKK Output	Satuan	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026
16	Komunikasi dan Informatika	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Perangkat Daerah	16	17	17	17	17	1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Perangkat Daerah	16	17	17	17	17
										2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Perangkat Daerah	16	17	17	17	17
										3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal)	Perangkat Daerah	16	17	17	17	17



No	Urusan	No IKK	IKK Outcome	Satuan	Target					No IKK	IKK Output	Satuan	Target					
					2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026	
											lainnya) dengan memanfaatkan							
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Layanan Publik	24	30	35	45	55	1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Koinfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	%	100	100	100	100	100	
										2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%	100	100	100	100	100	



No	Urusan	No IKK	IKK Outcome	Satuan	Target					No IKK	IKK Output	Satuan	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026
										3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	20	40	60	80	100
										4	Persentase layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	%	20	20	20	20	20
										5	Persentase layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	%	20	20	20	20	20
										6	Persentase system elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%	10	10	20	30	30



No	Urusan	No IKK	IKK Outcome	Satuan	Target					No IKK	IKK Output	Satuan	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026
										7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	%	5	25	45	55	75
										8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	%	30	35	40	45	50
										9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data dipusat data pemerintah	%	30	35	40	45	50
										10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	%	5	10	15	20	25
										11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	%	5	10	15	20	25
										12	Persentase perangkat daerah yang Mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	%	0	5	10	15	20



No	Urusan	No IKK	IKK Outcome	Satuan	Target					No IKK	IKK Output	Satuan	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026
										13	Persentase ASN pengelola TIK yang Tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	%	50	60	70	80	90
										14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi egovernment	Dokumen	1	1	1	1	1
		3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	70	70	70	70	70	1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kab/Kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kab/Kota	Kelompok Informasi Masyarakat (2 Kim) & Media/Cetak dan Elektronik (93)	95	95	95	95	95



No	Urusan	No IKK	IKK Outcome	Satuan	Target					No IKK	IKK Output	Satuan	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026
										2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kab/Kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Buah	156	156	156	156	156
										3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Perangkat Daerah	39	39	39	39	39
20	Statistik	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Perangkat Daerah	84	84	84	84	84	1	Tersedianya buku profil daerah	Buku	200	200	200	200	200



No	Urusan	No IKK	IKK Outcome	Satuan	Target					No IKK	IKK Output	Satuan	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026
										2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Kali	2	2	2	2	2
										3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Kali	2	2	2	2	2
										4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Kali	1	1	1	1	1
										5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	PD	84	84	84	84	84
										6	Persentase kelengkapan metadada kegiatan statistik sektoral	%	100	100	100	100	100
										7	Persentase kelengkapan metadada indikator sectoral	%	100	100	100	100	100
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan	Perangkat Daerah	84	84	84	84	84								



No	Urusan	No IKK	IKK Outcome	Satuan	Target					No IKK	IKK Output	Satuan	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026
			evaluasi pembangunan daerah														
21	Persandian	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Point	296	386	471	556	645	1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Kali	24	24	24	24	24
										2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Sistem Elektronik	2	2	2	2	2
										3	Persentase sistem elektronik/ asset informasi yang telah	Indeks Keamanan Informasi	2	2	2	2	2



No	Urusan	No IKK	IKK Outcome	Satuan	Target					No IKK	IKK Output	Satuan	Target						
					2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026		
										4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	Jaring Komunikasi Sandi	1	1					



BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Renstra Diskominfo Kabupaten Sukabumi Periode 2021-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Diskominfo untuk 5 (lima) tahun, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya dengan berpedoman pada RPJMD 2021-2026 sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan serta visi Kabupaten Sukabumi.

Renstra Diskominfo disusun sesuai amanat RPJMD tahun 2021-2026 sebagai bentuk upaya Diskominfo untuk lebih meningkatkan kualitas program dan kegiatan yang pada akhirnya akan bermuara kepada peningkatan kualitas kepada masyarakat. Dokumen Renstra ini diharapkan juga dapat memberikan makna terhadap skala prioritas pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik melalui penetapan program unggulan dengan mengantisipasi ketersediaan anggaran.

Dokumen Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan dengan harapan Renstra ini dapat dijadikan scenario pembelajaran jangka Panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan Diskominfo. Mengingat perubahan lingkungan strategis di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang sangat kompleks, rencana strategis ini dapat dilakukan kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Cikembang, 29 Oktober 2021
Kepala Dinas Komunikasi Informatika
dan Persandian

EKA NANDANG NUGRAHA, S.IP., MM
Pembina Tk.1 IV/b
NIP.19670903 199601 1 001